

Epigrafi Indonesia Dalam Kerangka Pikir Pasca - Modernisme

Daud Aris Tanudirjo

Keywords: inscription, theory, method, epigraphy

How to Cite:

Tanudirjo, D. A. Epigrafi Indonesia Dalam Kerangka Pikir Pasca - Modernisme. Berkala Arkeologi, 14(2), 10-16. <https://doi.org/10.30883/jba.v14i2.634>



Berkala Arkeologi

<https://berkalaarkeologi.kemdikbud.go.id/>

Volume 14 No. 2, 1994, 10-16

DOI: [10.30883/jba.v14i2.634](https://doi.org/10.30883/jba.v14i2.634)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

EPIGRAFI INDONESIA DALAM KERANGKA PIKIR PASCA - MODERNISME

Daud Aris Tanudirjo
(Jurusan Arkeologi FS - UGM)

1. Pendahuluan

Minat mengkaji prasasti sebagai sumber sejarah di Indonesia sudah mulai tertanam sejak awal abad XIX yang lalu. Hal itu dibuktikan dengan terbitnya buku *The History of Java* pada tahun 1817. Pengarangnya, Sir Thomas Stamford Raffles, gubernur jenderal Inggris yang menyisihkan dua bab bukunya untuk membahas dan mengklasifikasikan beberapa prasasti, baik berbahasa Jawa Kuna maupun Sanskerta. Walaupun kajian Raffles belum dapat disebut ilmiah, tetapi setidaknya ia telah mencoba memberi makna pada tinggalan bertulis yang ia ketahui. Boleh dikata, Raffles-lah yang pertama kali memanfaatkan tinggalan bertulis itu untuk merenka-reka sejarah tanah Jawa (Wibowo, 1976: 63).

Pada masa-masa sesudahnya, peran kajian prasasti dan naskah kuna lainnya, yang kemudian lebih dikenal sebagai *epigrafi*, semakin kuat terutama dalam upaya menyusun sejarah kuna Indonesia. Apalagi pada masa-masa awal berdirinya lembaga pengelola kepurbakalaan di Indonesia, para tokoh pemegang tampuk pimpinan lembaga itu, seperti J.L.A. Brandes, N.J. Krom, dan W.F. Stutterheim, adalah orang-orang berlatar-belakang filologi atau peminat pemaskahan kuna (Wibowo, 1976:63-74). Dengan latar-belakang keadaan itu, tidak mengherankan bahwa sejak semula kajian prasasti atau epigrafi di Indonesia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kajian kepurbakalaan. Sumber-sumber tertulis itu dikaji terutama untuk membangun kerangka waktu yang diperlukan dalam menjelaskan perkembangan budaya di Indonesia. Hal itu tercermin dari isi buku N.J. Krom *Hindu-Javaansche Geschiedenis* (1931) dan *Inleiding tot de Hindu-Javaansche Kunst* (1923) yang pernah menjadi buku babon sejarah kebudayaan di Indonesia (Boechari, 1978:3-12). Mengingat sejarahnya itu, sampai kini epigrafi Indonesia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kajian arkeologi pada umumnya. Bahkan secara akademik pun, epigrafi dimasukkan dalam bidang arkeologi. Karena itu, barangkali lebih tepat jika epigrafi Indonesia disebut sebagai *text-added archaeology* (Tanudirjo, 1991). Sebagai bagian dari arkeologi, bidang epigrafi telah terbukti memberikan banyak informasi yang amat penting dalam upaya merekonstruksi sejarah perkembangan masyarakat dan budaya di Indonesia, khususnya pada masa pengaruh Hindu-Budha. Namun, di balik itu semua, bidang epigrafi bukannya tidak menghadapi berbagai

kendala. Tidak jarang para pakar epigrafi sulit menemukan matarantai yang hilang. Banyak sisi-sisi gelap sejarah kuna Indonesia yang sampai kini belum mampu dijelaskan. Setidaknya ada dua kendala utama dalam kajian epigrafi yang dapat diidentifikasi oleh Boechari (1977:4). Pertama, ketidak-lengkapan data tertulis karena keausan atau kerusakan. Kedua, kurangnya pengetahuan akan bahasa yang digunakan pada tinggalan bertulis, sehingga menimbulkan kesulitan dalam penerjemahannya.

Menghadapi kesulitan ini, berbagai upaya telah diusahakan. Upaya itu tidak hanya berbentuk peningkatan kualitas sumberdaya manusianya saja tetapi juga perangkat analisis, antara lain melalui penajaman metodologinya. Beberapa upaya dan saran peningkatan metodologi itu telah tersurat dan tersirat dalam berbagai tulisan para pakar yang menekuni bidang ini (cf. Suhadi, 1978; Nastiti, 1985; Panitia Analisis Sumber Tertulis Masa Klasik, 1991). Tentu saja, upaya penajaman metodologi itu diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kita akan sejarah kuna Indonesia. Namun demikian, jika dipelajari lebih mendalam usulan metodologi itu lebih menekankan pada teknis penanganan dan prosedur analisis saja. Usulan yang lebih menyentuh pada aspek epistemologis dan penalarannya masih belum tampak benar. Model-model analisis yang ditawarkan oleh Panitia Analisis Sumber Tertulis Masa Klasik dari Puslitarkenasebenamnya cukup menarik dan tampaknya cukup handal dalam penerapannya (*applicable*). Namun, dari segi penalarannya, model ini hanya menawarkan proses penafsiran satu arah. Padahal proses penafsiran satu arah seperti ini acapkali menjerumuskan para penafsirnya ke dalam pola berpikir induktif picik (*narrow inductive*) atau membangun hipotesis di atas tumpukan hipotesis-hipotesis yang belum teruji. Jika hal itu berlanjut, sejarah kuna Indonesia akhirnya tidak lebih dari sekedar kisah-kisah roman sejarah saja.

Makalah ini mencoba menawarkan sebuah alternatif model penelitian sumber tertulis yang dilandasi pemikiran-pemikiran pasca-modernisme (*post-modernism*) seperti yang tercermin dalam karya-karya pakar arkeologi pasca-prosesual (*post-processual archaeology*). Mungkin saja model ini dirasakan bukan hal yang baru. Namun, setidaknya upaya menampilkan model ini dapat dianggap reaktualisasi untuk menyegarkan kembali ingatan para pakar epigrafi Indonesia

pada posisinya sebagai penafsir tinggalan bertulis.

2. Kerangka pikir pasca-modernisme dalam arkeologi

Gerakan Arkeologi Pembaharuan yang muncul sekitar tahun 1960 di Amerika sempat mendominasi kerangka pikir banyak pakar arkeologi di dunia selama beberapa dasawarsa. Namun, menjelang akhir 1980-an, pamor gerakan ini mulai memudar. Banyak kritik dilontarkan pada Arkeologi Pembaharuan karena kerangka pikir yang mereka tawarkan ternyata tidak selalu mampu memberikan penjelasan tuntas terhadap fenomena arkeologis yang dihadapi para pakar dalam pengkajian ilmiahnya. Ketidakmampuan ini telah mendorong banyak pakar arkeologi mencoba mencari kerangka pikir lain yang lebih handal. Akibatnya, berbagai aliran pemikiran baru bermunculan di dunia arkeologi (Tanudirjo, 1993).

Sebenarnya munculnya berbagai aliran pemikiran arkeologi ini tidak lepas dari kecenderungan di berbagai bidang kehidupan masyarakat yang akhir-akhir ini juga kehilangan kepercayaan pada kerangka pikir modernisme yang mulai diletakkan dasar-dasarnya pada Masa Pencerahan (*Enlightenment*) Arah kehidupan modern yang hendak dicapai melalui kecanggihan sains, teknologi dan rekayasa sosial ternyata dianggap tidak lebih memanusia-manusia manusia. Sebaliknya, justru menciptakan dunia yang tidak manusiawi dan menimbulkan keterasingan, sikap sinis, dan keterpelantingan manusia dari harkatnya. Kesadaran ini lalu menghantar manusia pada tahap pemikiran pasca-modernisme (*post-modernism*), yang tidak mau lagi terikat oleh kerangka pikir-kerangka pikir yang sudah mapan. Dalam dunia arkeologi sendiri, fenomena ini lebih dikenal dengan gerakan arkeologi pasca-prosesual (*post-processual archaeology*) (Hodder, 1991a).

Di antara aliran pemikiran yang ada dalam arkeologi pasca-prosesual, aliran Arkeologi Teori Kritis dan Arkeologi Konteks barangkali merupakan aliran yang paling mewakili pemikiran pasca-modernisme dalam arkeologi. Lagi pula, kedua aliran ini menyediakan ruang cukup lapang untuk pengembangan metodologi penafsiran sumber tertulis, sehingga sangat relevan untuk dibahas.

Arkeologi Teori Kritis sebenarnya bersumber pada gagasan para pemikir dari perguruan Frankfurt, Jerman. Pada hakikatnya, mereka tidak percaya bahwa penyusunan sejarah benar-benar dapat obyektif. Bagi aliran pemikiran ini, pengetahuan yang dikatakan ilmiah pun sudah dimuati gagasan para peneliti untuk memperkuat dominasinya dalam masyarakat. Pemahaman terhadap sesuatu baru menjadi berarti jika dikaitkan dengan suatu kerangka teori atau sudut pandang tertentu, dan pemahaman itu dapat

diperoleh melalui dialektika bagian - seluruhnya, yang disebut sebagai lingkaran hermeneutik (*hermeneutic circle*). Selain itu, aliran ini beranggapan bahwa budaya bersifat reflektif. Artinya, budaya bendawi tidak sekedar pencerminan kehidupan ekonomi, organisasi sosial, dan ideologi, tetapi mereka juga dapat dipakai sebagai sarana untuk menciptakan arti dan ikut menata dunia (Hodder, 1991a; 1991b; Bahn & Renfrew, 1991; Thomas, 1989).

Kerangka pikir di atas menyebabkan para penganutnya cenderung bersifat *anti-science*. Mereka tidak lagi percaya pada teori, dalil, dan model universal yang sering disebut sebagai perangkat ilmiah. Bagi mereka, semua itu hanyalah alat untuk membenarkan diri terhadap pandangan yang sudah bias. Oleh karena itu, mereka cenderung kembali pada pandangan kekhususan sejarah atau *historical-particularistic*, atau relativisme budaya yang dulunya ditentang Arkeologi Pembaharuan. Di sini, setiap fenomena dianggap sebagai suatu kejadian yang unik dan tidak pernah berulang. Karena itu, penjelasan fenomena itu hanya bisa dicari pada ciri-ciri yang melekat pada fenomena itu sendiri dan tentu saja konteksnya.

Tidak jauh berbeda dengan aliran Teori Kritis, Arkeologi Konteks, atau sering disebut pula Arkeologi Interpretif, juga cenderung melihat fenomena arkeologis sebagai suatu petunjuk adanya suatu peristiwa (*event*) yang pernah terjadi. Jadi, aliran yang dipelopori oleh Ian Hodder ini cenderung setuju dengan pandangan kekhususan sejarah tadi. Namun, Hodder sendiri mengakui bahwa penjelasan-penjelasan sistemik, adaptif, dan materialistik dalam Arkeologi Pembaharuan diperlukan dalam kajian arkeologi. Hanya saja, pendekatan yang cenderung saintifik tadi, diyakininya tidak akan mampu menembus dimensi idealistik dan simbolik suatu budaya (Hodder, 1991b). Untuk itu diperlukan pendekatan lain yang lebih bermuatan sejarah, kognisi, perambangan, dan peran individu, yang ia rangkum dalam pengertian 'konteks'.

Dalam Arkeologi Konteks ini (Hodder, 1991a; 1991b; 1991c) ditekankan bahwa keragaman hasil budaya manusia bisa jadi karena faktor individu, karena individu atau suatu pribadi berperan aktif sebagai pencipta dan pelaku budaya. Keadaan ini membuka peluang bagi setiap pribadi untuk menjadi agen penyebab variasi budaya. Selain itu, aliran ini juga menekankan agar pemahaman suatu fenomena budaya diletakkan dalam konteks sejarahnya sendiri. Konteks sejarah ini perlu diperhitungkan pada saat teori-teori yang digeneralisir diterapkan. Lebih jauh dikemukakan, untuk dapat menafsirkannya, suatu fenomena arkeologi harus diletakkan pada konteksnya yang luas, baik itu berupa lingkungan, teknologi, dan tindakan maupun konteks yang

terkandung dalam benda itu sebagai suatu *text* atau wacana. Suatu wacana hanya akan dapat dibaca dengan benar jika kita mampu memahami bahasanya, sehingga untuk mengerti perlu dipahami 'arti' suatu aspek budaya secara internal atau emik.

Gagasan yang disebut terakhir itu, akhirnya menghantar pada suatu diskusi yang lebih mendalam tentang cara pendekatan emik dan etik dalam memahami fenomena arkeologi. Mana di antara kedua pendekatan tersebut yang paling tepat? Salah satu jalan pemecahan yang sering dianggap mampu menjembatani kedua cara pandang ini adalah pendekatan empatetik (*emphatic approach*). Pendekatan ini pada dasarnya mengakui bahwa tindakan manusia dan budaya bendawi yang dihasilkan suatu budaya tertentu tidak selalu bersifat khusus dan unik, tetapi juga mempunyai unsur-unsur yang sama. Namun, tidak berarti bahwa generalisasi dan penjelasan silang budaya (*cross-cultural*) dapat diterapkan begitu saja. Cara penjelasan yang disarankan adalah dengan menempatkan diri peneliti menjadi bagian dari budaya yang ditelitinya. Dengan begitu, diharapkan peneliti akan mampu menangkap 'makna' suatu fenomena budaya dalam konteks aslinya yang bersifat khusus. Sebaliknya, ia diharapkan juga bersifat kritis dan dapat menjelaskan fenomena tadi dalam suatu kerangka pikir yang lebih luas (generalisasi/teori). Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan penjelasan yang lebih baik tentang fenomena yang ingin dijelaskan (Melas, 1991).

Berdasarkan pemikiran itu, Arkeologi Konteks atau Interpretif juga melihat lingkaran hermeneutik sebagai suatu cara memahami masa lampau yang paling tepat. Di dalam lingkaran hermeneutik ini semua 'tuntutan' Arkeologi Konteks (seperti peran individu, pemahaman dalam konteks luas, pendekatan empatetik, kekhususan sejarah, dan tidak bergantung pada teori-dalil) yang mencerminkan pemikiran pasca-modernisme tertampung. Dalam kerangka pikir ini, interpretasi tentang masa lalu tidak seharusnya merupakan interpretasi yang mandeg, tetapi menjadi interpretasi yang berkembang. Dalam proses ini selalu terjadi suatu dialektika antara bagian dan keseluruhan (*part-whole dialectic*) untuk mencapai pengertian yang lebih benar (Hodder, 1991c). Suatu fenomena (*part*) baru akan dipahami dan dijelaskan jika si peneliti mampu menempatkan fenomena itu dalam keseluruhan konteksnya (*whole*). Sebaliknya, fenomena yang diteliti dapat saja memberi pemahaman baru yang akan mengubah konteks atau pemahaman umum tadi.

Lingkaran hermeneutik harus dilihat sebagai upaya peneliti untuk menyelami kerangka pikir yang melatari fenomena yang ditelitinya, dengan menginterpretasikan fenomena yang ada.

Jika peneliti telah mampu 'menemukan' kerangka pikir itu, maka ia seharusnya menggunakan kerangka pikir itu untuk mengerti dan memahami lebih lanjut 'makna' atau wacana yang terkandung dalam obyek penelitiannya. Proses itu terus berlangsung hampir tiada henti, sehingga pada akhirnya suatu pemahaman 'baru', yang mungkin sangat lain dengan apa yang dipikirkan semula, dapat diperoleh. Dalam kerangka pikir seperti itulah perubahan-perubahan penafsiran sejarah dapat dimengerti.

3. Usulan sebuah model: tawar menawar

Jika dipelajari lebih jauh, metode hermeneutik yang ditawarkan arkeologi pasca-prosesual berintikan masalah komunikasi antara yang ditafsir (data arkeologi) dan penafsir (arkeolog). Karena intinya adalah komunikasi, maka yang paling penting di sini adalah kesatuan bahasa, agar tidak terjadi kesalahtafsiran atau kesalahpahaman. Namun, karena 'bahasa' untuk memahami data arkeologi sudah tidak ada lagi, arkeolog perlu secara terus menerus mencoba 'menemukan kembali bahasa' yang hilang itu dengan proses dialektika.

Dengan menggunakan bahasa sederhana, proses dialektika tadi dapat digambarkan seperti layaknya proses tawar-menawar yang di dalamnya selalu mengandung unsur-unsur obyektif dan subyektif. Obyektif karena sesuatu yang akan ditawarkan tentunya harus dinilai dengan tolok ukur tertentu, baru kemudian diberi 'harga'. Tawaran 'harga' ini bisa jadi harus diubah karena ternyata tawaran ini tidak disetujui; mungkin karena tolok ukurnya salah, atau 'harga'nya tidak tepat. Ketidaktepatan 'harga' ini mungkin terjadi karena unsur subyektif mulai masuk. Kepentingan yang menawarkan dan yang menawar berbeda. Proses tawar menawar akan terus berlangsung, kalau keduanya masih belum punya kesepakatan. Kesepakatan baru akan tercapai jika kedua pihak telah dapat saling memahami. 'Harga' yang disepakati itulah kesimpulan sementara yang dicapai dalam lingkaran hermeneutik.

Seperti dalam proses tawar-menawar tadi, metode hermeneutik dalam interpretasi sumber sejarah bertulis mempunyai unsur obyektif-subyektif. Pada tahap yang paling awal, sumber bertulis yang hendak ditafsirkan tentu saja harus diketahui seluk-beluknya, sehingga perlu deskripsi obyektif menurut kebiasaan yang berlaku. Dalam hal ini, sumber bertulis diperlakukan sama seperti artefak yang lain untuk mendapat informasi primer, yaitu informasi yang dapat diperoleh langsung dari artefak maupun lingkungannya (mengenai jenjang informasi arkeologi dalam penjelasan ini baca: Malina, Vasicek, 1990). Informasi primer terdiri dari informasi intern dan ekstern. Informasi intern antara lain bentuk, bahan, kondisi, aksara,

bahasa, dan atribut lain (lancana), sedangkan yang ekstern dapat berupa konteks atau lingkungan temuan, sejarah kepemilikan, dan jumlah seluruhnya (jika ada beberapa berkas / kopi).

Pada tahap awal ini pun, sudah bisa terjadi lingkaran hermeneutik, terutama dalam menentukan jenis aksara. Apakah jenis aksara yang ada pada suatu prasasti, misalnya, adalah gaya tulis pribadi, suatu kelompok tertentu, atau mewakili masa tertentu? Di sini, kajian paleografi diperlukan terutama tipografi. Salah satu bentuk pemecahannya tentu saja mencari pola konsistensi penulisan setiap aksara pada prasasti yang sama dan bersamaan dengan itu membandingkannya dengan sumber lain yang sejenis. Dengan sendirinya, hasilnya belum tentu kronologi prasasti (bandingkan dengan metode analitis struktural dari Panitia Analisis Sumber Tertulis Masa Klasik, 1991). Alasannya, belum tentu tolok ukur paleografi yang diterapkan benar. Di Indonesia sendiri, belum tampak upaya meninjau kembali paleografi yang disusun para pakar asing.

Tahap kajian berikutnya ditujukan untuk menemukan informasi sekunder, yaitu fungsi, tujuan, struktur, serta makna pola atribut tertentu. Dalam kaitan dengan ini tentu saja diperlukan alih aksara (transliterasi) dan alih bahasa (terjemahan/transkripsi). Pada tahap ini, umumnya para penafsir sumber sejarah menyadari pentingnya hermeneutik dan telah lazim menerapkannya. Mereka mengetahui bahwa makna suatu kata atau frasa dapat berbeda tergantung pada konteksnya. Untuk dapat menangkap makna yang tepat, seorang penafsir harus mengerti konteksnya dengan sebaik-baiknya. Keberhasilan Boechari (1978b) mengidentifikasi kata *amgati apus* sebagai terminologi hukum yang berarti merebut tunangan orang lain (laki-laki), atau penafsirannya terhadap kata *walaputra* dalam prasasti Sivagha sebagai anak bungsu Rakai Pikatan, yaitu Kayuwangi, dan bukan Balaputradewa seperti yang ditafsirkan Casparis, adalah contoh-contoh keberhasilan penerapan hermeneutik (disadari atau tidak) pada tingkat ini.

Namun, dalam usulan model ini penerapan lingkaran hermeneutik tidak hanya dari segi alih bahasa tetapi juga dalam menafsirkan fungsi, tujuan, struktur, dan makna atribut lainnya. Hal ini sering dilupakan dalam kajian epigrafi di Indonesia, misalnya tentang fungsi dan tujuan pembuatan prasasti. Harus diakui bahwa kebanyakan prasasti dibuat untuk penetapan *sima* (Boechari, 1977:5), tetapi dalam hermeneutik setiap prasasti mempunyai fungsi, tujuan, dan makna khusus. Karena itu, perlu kembali terjadi dialektika antara gagasan umum (*whole*) dan kasus khusus (*part*) untuk memperoleh pemahaman yang benar. Hal itu terlihat dari dua kasus prasasti Balitung, yaitu Mantyasih dan Wanua Tengah III yang masing-

masing memuat nama raja-raja Mataram Kuna yang berbeda. Walaupun sama-sama berkaitan dengan *sima*, tetapi ternyata kedua prasasti mengandung 'makna' (fungsional) yang berbeda. Prasasti Mantyasih berupa penetapan *sima* untuk para pejabat yang berjasa, sedangkan Wanua Tengah III berkaitan dengan status tanah (Kusen, pers. comm.). Jika hal ini disadari, mungkin akan lebih mudah dimengerti mengapa daftar nama raja pada kedua prasasti Balitung dengan beda waktu penulisan hanya 1 tahun. Dalam lingkaran hermeneutik, penafsir harus menyelami fungsi masing-masing prasasti dalam kasus ini, agar ia dapat lebih mengerti apa yang terjadi.

Kajian struktur juga masih sering terlepas dari lingkaran hermeneutik. Struktur 'baku' prasasti yang telah disusun beberapa sarjana (seperti manggala, penanggalan, pejabat-pejabat, sambandha, dsb.nya (lihat Boechari, 1977; Bakker, 1972)) sering diterapkan begitu saja tanpa mempertimbangkan keunikan dari suatu prasasti. Penerapan seperti ini menghalangi peneliti melihat hal-hal baru yang sebenarnya dapat mengubah pemahaman konteks. Hal ini dapat dicontohkan oleh kajian Casparis yang menunjukkan bahwa dengan melihat bagian daftar pejabat-pejabat dalam prasasti dapat diketahui perkembangan struktur birokrasi dari kerajaan Mataram Kuna hingga Majapahit, yang cenderung makin terpusat (*centralised*) (Casparis, 1986). Sementara itu Christie (1993) juga menemukan struktur prasasti yang berbeda pada masa Jawa Kuna. Prasasti abad IX-X didominasi daftar hadiah untuk para pejabat, tetapi setelah itu lebih didominasi oleh aturan perdagangan dan pajak. Bagi Christie, kecenderungan ini menjadi petunjuk perubahan kehidupan masyarakat dari agraris ke perdagangan. Dari tafsiran ini, ia kemudian mencoba memahami perubahan sikap masyarakat Jawa Kuna terhadap budaya bendawi dari masa itu.

Dari contoh-contoh di atas, menjadi jelas bahwa lingkaran hermeneutik pada tahap mengungkapkan data sekunder ini juga berpotensi untuk mengungkapkan hal-hal yang baru. Sebagai suatu hasil dialektika, tentu saja hal-hal baru yang diperoleh dari kasus (*part*) itu harus dimasukkan ke dalam kerangka pikir umum (*whole*), agar dalam tahapan lebih lanjut dapat menjadi dasar untuk menafsir lebih tepat.

Tingkat kajian berikutnya adalah analisis isi (*content analysis*). Yang dimaksud analisis isi di sini adalah mengkaji informasi yang diperoleh dari isi prasasti dalam konteks yang lebih luas (bentuk, ruang, dan waktu). Pada tahap inilah, peneliti mulai menafsirkan tinggalkan bertulis sebagai sumber sejarah. Peneliti mencoba mengerti dan mengungkapkan tidak saja yang tersurat tetapi juga yang tersirat serta berusaha melekkannya dalam konteks yang tepat. Di sini,

peneliti mencoba menangkap kejadian-kejadian, tatacara kehidupan, keadaan ekonomi, sosial, dan berbagai aspek-aspek budaya lainnya. Mengingat tingkat tujuan tafsirannya yang lebih kompleks, tentu saja kerangka pikir umum sebagai modal menafsirkan juga harus diperluas, agar berbagai kemungkinan yang ada dapat dipertimbangkan. Bahkan, dalam kerangka pikir umum dapat saja dicoba gagasan-gagasan dan konsepsi-konsepsi subyektif dari peneliti, sebagai tawaran cara pemahaman baru.

Pada tingkat ini pun, sifat keterbukaan hermeneutik untuk siap menerima masukan kembali harus tetap dijaga. Jika informasi khas yang diperoleh dari sumber yang dikaji tidak sesuai dengan kerangka pikir yang dipakai, tentu harus dicari letak ketidakcocokan itu. Dengan cara demikian, fenomena-fenomena yang khas harus dicoba dimengerti atau dijelaskan dan tidak tergilas oleh penerapan kerangka pikir umum. Sebaliknya, dapat saja pemahaman atau pengertian yang telah diperoleh sebelumnya dipertanyakan kembali. Kajian semacam inilah yang memungkinkan peneliti melihat kekhususan sejarah dan jika mungkin menjelaskannya.

Lingkaran hermeneutik seperti itu masih lebih banyak diabaikan daripada diperhatikan dalam kajian epigrafi Indonesia. Pengertian yang diperoleh berdasarkan simpulan-simpulan terdahulu seolah menjadi suatu 'kebenaran'. Padahal semestinya hanya dipakai sebagai tolok ukur awal saja. Jika kerangka pikir peneliti sudah tertutup oleh apa yang benar, maka pada hakekatnya ia tidak akan dapat memperluas cakrawala pemahamannya terhadap fenomena yang ingin dipelajarinya. Untuk menyebutkan sebuah contoh, kesimpulan Boechari tentang kedudukan *Mahamantri i hino* dalam struktur kerajaan Jawa Kuna mencerminkan hal itu. Setelah mengkaji sejumlah besar prasasti, Boechari (1967/68) berhasil memberikan gambaran struktur birokrasi kerajaan Jawa Kuna setidaknya hingga abad XIII. Selain itu, ia menginterpretasikan bahwa *Rakryan Mahamantri i hino* adalah putra mahkota atau calon pengganti raja yang sedang berkuasa. Sampai pada taraf ini, Boechari telah maju selangkah dengan menemukan (dalam kerangka pikirnya) struktur birokrasi dan mekanisme suksesi dalam kerajaan Jawa Kuna. Namun, interpretasi ini berhenti pada 'penyimpulan' yang seolah-olah sudah benar. Buktinya tidak ada kritik dan sanggahan tentang hal itu. Apakah memang demikian adanya? Jika mengikuti lingkaran hermeneutik, mestinya Boechari juga harus menjelaskan peristiwa-peristiwa khusus yang terjadi. Misalnya saja, mengapa Sindok yang sedang menjadi raja masih sering disebut *Rakryan Mapatih i hino* atau *i halu* secara bergantian dalam prasasti-prasastinya (Suhadi, 1982)? Dalam struktur birokrasi

yang berhasil direkonstruksi tadi, dapatkah seorang raja menjadi putera mahkota pertama atau kedua pada waktu-waktu tertentu? Jika jawabnya 'ya', maka perlu dijelaskan alasannya dengan memaparkan konteks yang umum. Jika tidak, maka tafsiran Boechari perlu ditinjau kembali.

4. Epilog: kilas balik penelitian epigrafi di Indonesia

Dalam sejarah perkembangan epigrafi di Indonesia, berbagai pergulatan pemikiran untuk memperoleh interpretasi yang lebih baik pun sebenarnya telah lama terjadi. Sebagai contohnya adalah debat antara C.C.Berg dan para pakar sejarah kuna Indonesia lainnya. Menurut Berg, untuk memahami dengan lebih tepat sejarah Jawa, sumber-sumber tertulis berupa naskah maupun prasasti harus dikaji berdasarkan kerangka pikir dan pandangan orang Jawa. Cara pandang bersifat emik ini ketika itu disebut metode *Syntypis* oleh Berg. Hal ini ditentang oleh para pakar epigraf dari Belanda lainnya yang tentunya cenderung menerapkan pendekatan etik. Pakar sejarah Indonesia sendiri, seperti Poerbatjaraka (1952) dan Sutjipto Wirjosuprpto (1978) pernah mengungkapkan seringnya tafsiran pakar Belanda tidak tepat karena mereka tidak betul-betul memahami budaya Jawa. Boechari sebenarnya juga telah melihat kebenaran gagasan Berg (Boechari, 1977:24-25), namun ia mengaku bingung bagaimana untuk menerapkannya dalam praktek. Akhimya, ia memilih menyetujui pendapat Zoetmulder yang menyatakan kemustahilan peneliti yang hidup sekarang ini akan dapat sepenuhnya menemukan apa yang tersirat dalam tinggalan bertulis yang dikajinya, dan memang terbukti kajian-kajian epigrafis Indonesia selanjutnya cenderung bersifat etik. Dalam kondisi seperti ini dapat dipahami jika lingkaran hermeneutik diterapkan dalam pengertian yang sempit saja, khusus dalam proses alih bahasa. Kerangka pikir masyarakat Indonesia sendiri justru makin tidak diperhatikan. Akibatnya banyak sisi-sisi gelap sejarah kuna Indonesia yang sampai kini belum dapat dimengerti. Saat ini dalam dunia arkeologi muncul kesadaran baru bahwa kerangka berpikir satu arah tidak mampu menjelaskan fenomena yang diteliti dengan tuntas, dan rupanya lingkaran hermeneutik dilihat sebagai perangkat baru yang mungkin tepat untuk dipakai. Di dalamnya kerangka pikir masyarakat yang diteliti mendapatkan kedudukan penting, sehingga tafsir yang dihasilkan akan lebih tepat dan kurang bias. Barangkali dengan cara itu sisi-sisi yang masih gelap dalam sejarah Indonesia kuna segera dapat dimengerti.

Akhirnya, para pemikir pasca-modernisme menitipkan pesan untuk para pakar epigraf Indonesia sebagai berikut.

- * sejarah adalah fenomena yang khas
- * tempatkan pada konteksnya, maka anda akan mengerti
- * perhatikan juga peran individu
- * sukalah berdialog, terbuka pada setiap kemungkinan dan terus belajar dari situ
- * jangan takut beda dan subyektif, karena itu termasuk proses untuk memahami
- * tidak ada keharusan tunduk pada generalisasi, dalil dan teori yang sudah mapan
- * bersifatlah empati maka anda akan lebih mengerti

KEPUSTAKAAN

- Bahn, Paul & Colin Renfrew., 1991., **Archaeology :theories, methods, and practice.** London : Thames and Hudson.
- Bakker, J.W.M., 1972., **Ilmu prasasti Indonesia** Yogyakarta: Jur. Sejarah Budaya IKIP Sanata Dharma.
- Boechari., 1977., *Epigrafi dan Sejarah Indonesia.* **Majalah Arkeologi I no. 1.** Hlm. 1-31
- _____. 1978a., *Bahan kajian arkeologi untuk pengajaran sejarah.* **Majalah Arkeologi II no. 1** Sept 1978. Hlm. 3- 26
- _____. 1978b. *Catatan tentang istilah arkeologi.* **Majalah Arkeologi I, no. 3** Januari 1978. Hlm. 54-59
- Buchari. 1967/1968. *Rakryan Mahamantri I Hino . A study on the highest court dignitary of ancient Java up to the 13th century AD.* **Journal of the Historical Society University of Singapore.** Hlm. 7-20
- Casparis, J.G.de., 1986., *The evolution of the socio-economic status of the East-Javanesse village and its inhabitants,* dalam Sartono Kartodirjo (ed.) **Papers of the Fourth Indonesian-Dutch History Conference Yogyakarta 24-29 July 1983.** Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hlm. 3-24.
- Christie, Jan Wisseman. 1993. *Trade and value in pre-Majapahit Java.* **Indonesian Circle no. 59&60.** Hlm. 3-17.
- Hodder, Ian., 1991a. *Post-modernism, post-structuralism, and post processual archaeology,* dalam Ian Hodder (ed.) **The Meaning of Things.** London: Harper-Collins. Hlm. 64-78
- _____, 1991b. **Reading the Past.** Cambridge : Cambridge University Press.
- _____, 1991c., *Interpretive archaeology and its role.* **American Antiquity vol. 56 (1)** January 1991. Hlm. 7-18.
- Malina, J. & Z. Vasicek., 1990., **Archaeology Yesterday and Today.** Cambridge: Cambridge University Press.
- Melas, E.M. 1991. *Ethics, emics, and empathy in archaeological theories,* dalam Ian Hodder (ed.) **The Meaning of Things.** London : Harper Collins. Hlm. 137-155.
- Nastiti, Titi Surti., 1985. *Metode Penelitian Naskah Jaman Klasik.* Makalah disajikan dalam Rapat Evaluasi Metode Penelitian Arkeologi II, Mei.
- Panitia Analisis Sumber Tertulis Masa Klasik. 1991. *Sinopsis Analisis Sumber Tertulis Masa Klasik.*
- Poerbatjaraka., 1952., **Riwayat Indonesia I.** Djakarta: Pembangunan
- Suhadi, Machi., 1978., *Penelitian prasasti di Indonesia.* **Lokakarya Arkeologi 1978.** Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Hlm. 61-70.
- _____, 1982. *Sedikit tinjauan tentang struktur pemerintahan Zaman Sindok dan Zaman Majapahit.* **PIA II 1977.** Hlm. 295-331
- Wirjosuparto, Sutjipto., 1978., *Adakah biandri dan poliandri di Indonesia?.* **Majalah Arkeologi I no. 4** Maret 1978. Hlm. 55-67
- Tanudirjo, Daud Aris., 1991., *Theoretical trends in Indonesian archaeology* A paper presented in the **Theoretical Archaeology Group** Southampton December 1991
- _____, 1993. *Arkeologi Indonesia masa depan: Multilinier atau Unilinier?.* Makalah disajikan dalam **EHPA** di Kaliurang, Juli.
- Thomas, David Hurst. 1989. **Archaeology.** Forth worth: Holt, Rinehard and Winston

Wibowo, A.S., 1976., *Riwayat penyelidikan prasasti di Indonesia* dalam Satyawati Su-leiman (ed.) **50 Tahun Lembaga Purbakala 1913-1963**. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Hlm. 60-103

Penghargaan:

Makalah ini tidak akan mencapai tarafnya sekarang tanpa bantuan dari Drs. Kusen sebagai teman diskusi yang merangsang gagasan-gagasan, dan juga Drs. Djoko Dwiyanto serta Drs. Tjahjono Prasodjo yang menyediakan bahan-bahan bacaan yang mendukung penulisan makalah ini. Untuk itu sepantasnyalah, pada kesempatan ini saya berterimakasih dan menyatakan penghargaan yang setulusnya.